

TESIS

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SERTA BUDAYA
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASITERHADAP KINERJA
KEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

*Analysis of The Effect of Regional Financial Management, Accountability and
Transparency and Organizational Culture as Moderating Variables on The
Financial Performance of The Mamuju Regency Government*

**SUJANADI
A042191022**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

TESIS

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SERTA BUDAYA
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASITERHADAP KINERJA
KEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

*Analysis of The Effect of Regional Financial Management, Accountability and
Transparency and Organizational Culture as Moderating Variables on The
Financial Performance of The Mamuju Regency Government*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**SUJANADI
A042191022**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

TESIS

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SERTA BUDAYA
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASITERHADAP
KINERJA KEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

disusun dan diajukan oleh

**SUJANADI
A042191022**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 25 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP. 196406091992031000

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Sumardi, S.E., M.Si
NIP. 195605051985031002

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SUJANADI

NIM : A042191022

PROGRAM STUDI : MAGISTER KEUANGAN DAERAH

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI SERTA BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tests ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tests ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2021

yang membuat pernyataan,


SUJANADI

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari penyusunan tesis ini banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi penulis. Atas semua pihak yang telah banyak berperan membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga, utamanya kepada:

1. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah FEB Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
2. **Prof. Dr. Arifuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA.** dan **Prof. Dr. Sumardi, SE.,M.Si** selaku pembimbing dan tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literature.
3. **Dr. AnasIswanto Anwar, SE., MA,** **Dr. Asri Usman, SE.,Ak.,M.Si.,CA** dan **Dr. Wardhani Hakim, SE.,M.Si** selaku penguji yang juga berpartisipasi sangat besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan kesempurnaan tesis penulis;
4. Rekan-rekan **Pengelola Keuangan OPD Pemerintah Kabupaten Mamuju** yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner yang bagikan peneliti.
5. Saudara-saudaraku seangkatan **Kelas MKD Mamuju 2019** atas segala bentuk kerjasama dan kekompakan dalam pelaksanaan proses perkuliahan hingga selesainya masa studi;
6. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
7. Saudaraku **Muh. Yasin, Jayadin, St. Nurlaila, S.Pd., Ratnawati, SE,** dan **Sri Endang, SE** atas doa dan dorongan semangat yang diberikan dalam

8. Anak-anakku tercinta **Widi Munayya, Alkahf Hasyim** dan **Uwais AL Qarni** yang selalu memberikan semangat dan hiburan sehingga penulis masih bertekad kuat dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan moril maupun spiritual dalam penyusunan tesis ini.

Terkhusus dan teristimewa penulis sampaikan kepada ibunda dan ayahanda tercinta **CAYA** dan **MUH. YACOB DENNA. BA.** dengan penuh kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala doa yang tak henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis. Selain itu, kepada Istri tercinta **dr. DEWI KUSUMAWATI** yang telah sabar dan mendukung serta selalu menemani perjuangan dalam hidup penulis sehingga penulis terus termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini. Masih banyak kekurangan diakibatkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan pada hasil penulisan selanjutnya. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Makassar, September 2021

Peneliti

Sujanadi

ABSTRAK

Sujanadi. Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Serta Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Dibimbing oleh Arifuddin dan Sumardi)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Serta Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey . Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas dimana terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kausal. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis). Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS), dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pengelolaan keuangan daerah , akuntabilitas dan transparansi berpengaruh langsung dan tidak langsung (melalui variabel budaya organisasi) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Mamuju.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Budaya Organisasi Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



ABSTRACT

SUJANADI. *Analysis of The Effect of Regional Financial Management, Accountability and Transparency and Organizational Culture as Moderating Variables on The Financial Performance of The Mamuju Regency Government (Supervised by Arifuddin and Sumardi)*

This study aims to analyze and explain the Effect of Regional Financial Management, Accountability and Transparency and organizational Culture as Moderating Variables on the Financial Performance of The Mamuju Regency Government.

The type of this research was descriptive quantitative research with survey method. This research was a causality study where there was a causal relationship between two or more variables. The method of data analysis in this study was multiple linear regression analysis (Multiple Regression Program Analysis). The research data were processed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) program, using data collection techniques through questionnaires.

The results of the study show that regional financial management, accountability and transparency have direct and indirect effect (through organizational culture variables) on the financial performance of local governments in Mamuju Regency.

Keywords: Regional Financial Management, Accountability, Transparency, Organizational Culture and Local Government Financial Performance



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis	11
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	11
2.1.2 Teori Perilaku Organisasi.....	13
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	15
2.1.4 Akuntabilitas	18
2.1.5 Transparansi	20
2.1.6 Budaya Organisasi	24
2.1.7 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.2 Hubungan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi dan Budaya Organisasi	27
2.3 Penelitian Terdahulu	29

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Pikir	34
3.2 Hipotesis	35
3.2.1 Pengaruh Pengelola Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	36
3.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	38
3.2.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	39
3.2.4 Pengaruh Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi	38

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian	41
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	41
4.4 Jenis dan sumber data	42
4.5 Metode Pengumpulan data	42
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
4.6.1. Variabel Independen	43
4.6.2. Variabel Moderasi	45
4.6.3. Variabel Dependen	46
4.7 Metode Analisis data	47

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis hasil Penelitian	51
5.1.1 Uji validitas dan reliabilitas	51
5.1.2 Tingkat pengembalian kuesioner	54
5.1.3 Deskripsi variabel	60

5.2 Hasil Analisis Data dan Pembahasan.....	68
5.2.1 Pengaruh Pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	70
5.2.2 Pengaruh Akuntabilitasterhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	71
5.2.3 Pengaruh Transparansiterhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	73
5.2.4 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi ...	75
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi penerimaan	3
Tabel 1.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju	3
Tabel 5.1 Hasil uji validitas	51
Tabel 5.2 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	53
Tabel 5.3 Response Rate	54
Tabel 5.4 Deskripsi responden	56
Tabel 5.5 Distribusi frekwensi responden menurut jenis kelamin	57
Tabel 5.6 Distribusi frekwensi responden menurut umur	58
Tabel 5.7 Distribusi frekwensi responden menurut latar belakang pendidikan ..	58
Tabel 5.8 Distribusi frekwensi responden menurut lama bekerja	59
Tabel 5.9 Deskripsi Jawaban Pengelolaan keuangan daerah	60
Tabel 5.10 Deskripsi Jawaban Akuntabilitas	61
Tabel 5.11 Deskripsi Jawaban Transparansi	63
Tabel 5.12 Deskripsi Jawaban Budaya Organisasi	65
Tabel 5.13 Deskripsi Jawaban Kinerja Keuanga Pemerintah Daerah	67
Tabel 5.14. Ringkasan Hasil Analisis Pengaruh Antar Variabel	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 kerangka konseptual.....34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah, masih terdapat kendala yang harus diperbaiki.

Tolak ukur keberhasilan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah dapat dilihat dari pencapaian kinerja keuangan. Isu tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik dan belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintah daerah mempunyai kinerja keuangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Mahsun (2006) mengatakan bahwa: “kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja”. Pemerintah dapat dikatakan mempunyai kinerja keuangan yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Salah satu tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam perolehan pendapatan. Berdasarkan data

yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 2015 – 2017 menunjukkan adanya tren peningkatan .

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Kabupaten Mamuju 2015-2017

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah (Ribuan Rupiah)		
	2015	2016	2017
A. PENDAPATAN DAERAH	688.532.098	1.050.259.290	1.030.499.769
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50.560.809	59.253.400	75.634.662
1.1 Pajak Daerah	15.779.793	19.297.293	22.676.263
1.2 Retribusi Daerah	7.882.510	22.548.397	23.824.698
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.162.294	3.898.687	4.150.000
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	23.736.212	13.509.023	24.983.701
2. Dana Perimbangan	559.780.526	896.060.375	794.225.477
2.1 Bagi Hasil Pajak	25.708.447	20.405.298	13.710.746
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	1.103.581	7.000.426
2.3 Dana Alokasi Umum	463.324.979	626.855.666	627.181.494
2.4 Dana Alokasi Khusus	70.747.100	247.695.830	146.332.811
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	78.190.763	94.945.515	160.639.630
B. PEMBIAYAAN DAERAH	32.227.776	59.587.766	35.488.008
JUMLAH	720.759.874	1.050.259.290	1.065.987.777

Sumber : BPS Kabupaten Mamuju, 2021 (<https://mamujukab.bps.go.id>)

Namun demikian, tren peningkatan penerimaan pendapatan tersebut belum mampu meningkatkan rasio kemandirian keuangan, sebagai salah satu indikator kinerja keuangan Kabupaten Mamuju, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah)	Dana Perimbangan (Ribuan Rupiah)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kategori
2015	50.560.809	559.780.526	9%	Rendah Sekali
2016	59.253.400	896.060.375	7%	Rendah Sekali
2017	75.634.662	794.225.477	10%	Rendah Sekali

Sumber: Data diolah, 2021

Masih rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa masih sangat dibutuhkan adanya strategi dan kesamaan langkah dari semua pihak untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dijadikan strategi peningkatan kemandirian keuangan sebagai salah satu indikator kinerja keuangan daerah.

Pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam *Stewardship theory* merupakan pengelola keuangan selaku *steward* dipandang sebagai suatu unsur yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik, dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat dalam merencanakan dan melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya, para pengelola keuangan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi mereka. Pengelolaan keuangan daerah pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilakukan secara cermat guna dapat menyelesaikan kendala - kendala akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi keuangan secara memadai. Mardiasmo (2004) menegaskan: “bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula”. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. APBD sendiri juga tidak bisa terlepas dari Pendapatan Daerah yang terdiri Dana Alokasi Umum yang dapat mempengaruhi Sumber Pendapatan Asli Daerah (Ramadhan, 2012), disamping Belanja Daerah sehingga pengelolaan APBD menjadi suatu kerangka yang utuh yang terbungkus

dalam akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sudah dilakukan oleh Putra *et al.* (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Di bidang keuangan, negara mewajibkan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Darise, 2008).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2006). Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Stewardship theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya. Manajer dalam hal ini pengelola keuangan akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya. Hal ini disebabkan karena *steward* merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku *principal* merupakan pertimbangan yang rasional serta *steward* akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat, memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah suatu konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Menurut Sulistyorini dalam Sopanah (2005) pemerintah yang akuntabel memiliki ciri-ciri (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional dan (5) adanya sarana publik untuk menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran lebih

partisipatif dan mekanisme pengawasan baik internal ataupun eksternal terhindar dari praktek KKN.

Selain itu, dengan ditingkatkannya akuntabilitas publik dan transparansi akan mewujudkan *good corporate governance* yang semakin baik dari tahun ketahun (Rofiqoh, 2006). Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil. Selain itu akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Novatiani *et al.* (2019), Umar *et al.* (2018), Riswanto (2016), Auditya *et al.* (2013) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah transparansi. Adapun prinsip transparansi, memiliki dua aspek dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka akan informasi-informasi mengenai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani kinerjanya dengan baik. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-

informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi (Krina, 2003).

Penelitian tentang pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Novatiani *et al.* (2019), Umar *et al.* (2018), Riswanto (2016), Auditya *et al.* (2013) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan. Namun demikian hasil berbeda ditunjukkan oleh Putra *et al.* (2016), Nasution (2018) , karena transparansi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan menambahkan variabel yang diduga berpengaruh yakni budaya sebagai variabel yang bisa mempengaruhi hubungan antara pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemilihan budaya sebagai pemoderasi dengan pertimbangan bahwa kepentingan atas kinerja dibutuhkan untuk menilai seberapa jauh lembaga atau organisasi dapat menerapkan visi dan misinya agar pelayanan publik dapat terwujud. Salah satu bentuk konsistensinya adalah perlu dilakukannya suatu aktivitas yaitu melakukan budaya organisasi yang setiap harinya dilakukan didalam organisasi tersebut. Sutrisno (2010) berpendapat bahwa budaya organisasi sebagai perangkat sistem nilai-nilai (values), keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi (assumptions), atau norma-norma yang telah

lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku serta pemecahan masalah- masalah organisasinya. Budaya organisasi adalah suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk pegawai dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian Ardilla (2020) menunjukkan bahwa budaya berpengaruh terhadap kinerja sektor publik

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju?
4. Apakah Budaya Organisasi dapat memoderasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju?
5. Apakah Budaya Organisasi dapat memoderasi Akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju?

6. Apakah Budaya Organisasi dapat memoderasi Transparansi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
3. Pengaruh Transparansi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
4. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dengan Budaya Organisasi sebagai variabel moderasi.
5. Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dengan Budaya Organisasi sebagai variabel moderasi.
6. Pengaruh Transparansi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dengan Budaya Organisasi sebagai variabel moderasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu mempunyai manfaat secara :

1) Teoritis yaitu untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Trasparansi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten MamujudenganBudaya Organisasi sebagai variabel moderasi.

2) Praktis :

a. Bagi penulis

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui faktor apa saja yang lebih besar pengaruhnya terhadap kinerja Keuangan Daerah.

b. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan menyediakan informasi mengenai faktor apa yang berperan positif dan paling signifikan untuk mempengaruhi kinerja keuangan Daerah.

c. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan Peningkatan Kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

d. Bagi Pemerintah / Organisasi Perangkat Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi seluruh aparat Pengelola Keuangan Daerah untuk mempertahankan kinerja keuangan di pemerintah Kabupaten Mamuju.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan

Pendahuluan berisi pengantar menuju penelitian yang berisi LatarBelakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II :Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang Landasan Teori yang dipergunakan untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai dasar teoritik yang dijadikan pusatpenelitian yang dilakukan. Selain itu juga terdapat Kerangka Pemikiran.

BAB III :Metode Penelitian

Metode Penelitian berisi tentang Desain Penelitian, Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Variabel Penelitian Dan. Definisi Operasional Variabel, Prosedur Pengumpulan Data dan Teknik Analisis.

AB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasanmenyajikan hasil analisis pengaruh pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan trasparansi terhadap kinerja keuangan Daerah

BAB V Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan dan Saranmenyajikan kesimpulan dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan pelaksanaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Stewardship

Teori *Stewardship* yang merupakan bagian dari teori keagenan diperkenalkan oleh Donaldson et al. (1997) sebagai teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* ini menegaskan bahwa manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan *principal*. Asumsi teori *stewardship* atau pengabdian bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* (pelayan yang baik) yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.

Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkap segala informasi, baik keberhasilan

maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut. Hubungan yang terjadi antara *principal* dan *steward* dalam hal ini rakyat dan pemerintah karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Mardiasmo, 2009).

Stewardship theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya. Manajer dalam hal ini pengelola keuangan akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya. Hal ini disebabkan karena *steward* merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku *principal* merupakan pertimbangan yang rasional serta *steward* akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat, memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan *stewardship theory*, pengelola keuangan selaku *steward* dipandang sebagai suatu unsur yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik, dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat dalam merencanakan dan melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya, para pengelola keuangan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi mereka. Untuk melaksanakan tanggung

jawab tersebut, maka *stewards* (pengelola keuangan) mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk meningkatkan efektivitas pengelola keuangan.

2.1.2 Teori Perilaku Organisasi

Teori perilaku organisasi merupakan suatu disiplin ilmu yang menjelaskan mengenai perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja dan tujuannya, baik kinerja atau tujuan organisasi, kinerja kelompok ataupun kinerja secara individu. Perilaku organisasi dikenal sebagai bidang kajian perihal organisasi. Studi tersebut merupakan bidang kajian akademik khusus mempelajari organisasi, dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi.

Robbins dan Judge (2008) mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok serta struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan mengimplementasikan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Sementara, Thoha (2014) mengemukakan perilaku organisasi sebagai suatu sistem studi dari sifat organisasi seperti bagaimana organisasi dimulai, tumbuh dan berkembang, dan bagaimana pengaruh terhadap anggota-anggota sebagai individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi lainnya serta institusi-institusi yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dikemukakan bahwa perilaku organisasi didefinisikan sebagai hakikat mendasar pada studi keperilakuan itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu

organisasi. Selain itu, perilaku organisasi juga secara langsung berhubungan dengan pengertian, ramalan dan pengendalian terhadap tingkah laku individu-individu dalam organisasi, serta bagaimana perilaku individu-individu tersebut mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Kerangka dasar perilaku organisasi bertumpu pada minimal dua aspek, yaitu individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut.

Untuk memahami perilaku organisasi, sebaiknya yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah individu-individu sebagai elemen penting organisasi tersebut. Salah satu metode untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang merupakan bagian dari padanya. Terdapat prinsip-prinsip perilaku dalam berorganisasi menurut Thoha dan Hutapea (2008), yaitu manusia berperilaku berdasarkan kemampuan yang dimiliki, manusia berperilaku berdasarkan kebutuhan, manusia berperilaku berdasarkan lingkungan yang diketahuinya, manusia berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, manusia bereaksi terhadap senang atau tidak senang, dan sikap serta perilaku manusia ditentukan berbagai faktor internal.

Komitmen organisasi merupakan elemen perilaku organisasi yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan individu untuk berperilaku dan bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi yang kuat dalam diri individu akan mengarahkan dan menyebabkan individu berusaha mencapai tujuan dan kepentingan organisasi, serta kemauan untuk berusaha atas nama organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Teori perilaku organisasi dapat menjelaskan hubungan perilaku individu dalam hal ini komitmen organisasi

terhadap pencapaian kinerja dan tujuan organisasi yakni ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran keuangan berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan

keuangan daerah. Waktu pelaksanaan APBD sama seperti halnya dengan waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah plafon belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya pendapatan dan pembiayaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran belanja pada APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedianya anggaran untuk membiayai pengeluaran belanja tersebut.

Menurut Baldric Siregar (2015:12) keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk

masyarakat. Berikut ini adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut:

1. Tertib Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
3. Efektif Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisiensi Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis Pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatuhan Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas : “akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban”. Sesuai pendapat Akbar (2012), Namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni *accountability for probity and legality*, *process accountability*, *performance accountability*, *programme accountability* and *policy accountability*. “Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Ismiarti,2013)”.

Pada dasarnya, “akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak - pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006)”. Hal tersebut memiliki arti bahwa pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu,

hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Annisningrum (2010) mengatakan: “akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. atau dengan kata lain dapat diartikan akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

Kriteria akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. “Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai - nilai atau norma - norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina,2003). Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan interchangeable, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang participative sebagai suatu konsekuensi logis.

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai

digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang sehingga menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan kinerja keuangan pemerintah sangat terpuruk pada saat itu.

2.1.4 Transparansi

Coryanata (2007) mengatakan: “transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga - lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak - pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau”. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Annisaningrum (2010), menyatakan: “transparansi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan

ketaatannya pada peraturan perundang - undangan”. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, “media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto,2012)”.

Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandaimemilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik dikarenakan terdapat hal – hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Pasaribu (2011) mengatakan: “transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat”. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai. Menurut Werimon *et al.* (2007): “prinsip transparansi meliputi 2 (dua) aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi”. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat.

Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Werimon *et al.* (2007) juga menyebutkan bahwa:, “kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukan auditing sektor publik dan berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*). Lebih lanjut dikatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini APBD maka pengawasan yang

dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Dalam ranah keuangan publik, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Mardiasmo (2004) mengatakan: “transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi”. artinya pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak - pihak yang berkepentingan.

Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih,

efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak kepada kinerja keuangan pemerintah yang juga akan ikut terdongkrak.

Manajemen kinerja keuangan yang baik adalah merupakan titik awal dari transparansi, untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus menangani dengan baik kinerja keuangannya dengan memperhatikan 2 (dua) aspek transparansi yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi juga harus memiliki keseimbangan karena transparansi juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi - informasi yang mempengaruhi hak dan privasi individu.

2.1.5 Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang baik pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjiptono (2000: 75), yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh banyak aspek salah satunya adalah budaya organisasi dan cara pengorganisasiannya. Dalam organisasi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuannya, sedangkan jalannya organisasi dipengaruhi oleh perilaku banyak individu yang memiliki kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, budaya organisasi sangat penting, karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam organisasi. Kebiasaan tersebut mengatur tentang norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh para anggota organisasi, sehingga menghasilkan budaya yang produktif. Budaya yang produktif

adalah budaya yang dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan tujuan perusahaan dapat tercapai. salah satu karakteristik budaya organisasi adalah memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan aturan dan keuntungan yang ditekankan sehingga dapat meningkatkan performa yang dimiliki oleh perusahaan (Deshpande & Farley, 1999).

Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam berinteraksi dan bertindak menyelesaikan satu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak (Robert dan Angelo, 2005). Robbins (2001) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Kinichi (2005) menyatakan budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Geiger (1998) menemukan bahwa nilai budaya atau culture dapat meningkatkan sebuah komitmen. Jika komitmen karyawan telah diperoleh, akan didapatkan karyawan yang setia dan mampu bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan atau organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berfikir dan merasakan masalah yang dihadapi. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah system nilai organisasi yang dianut oleh

anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan perilaku para anggota organisasi. dalam masyarakat, budaya organisasi mempengaruhi nilai-nilai atau etika individu, sikap-sikap, asumsi-asumsi dan harapan-harapan individu. Perpaduan budaya masyarakat dan budaya organisasional dapat menghasilkan dinamika didalam suatu organisasi.

Indikator-indikator Budaya Organisasi menurut Mc Kenna (2005) adalah sebagai berikut.

- a. Hubungan antar manusia dengan manusia, keyakinan masing-masing anggota organisasi bahwa mereka diterima secara benar dengan cara yang tepat dalam sebuah organisasi
- b. Kerjasama, kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan sebuah tugas yang telah ditetapkan.
- c. Penampilan, adalah kesan yang dibuat oleh seseorang untuk orang lain.

Phithi Sithi Amnuai (1989) dalam tulisannya *How to Build a Corporation Culture* dalam majalah Asian Manajer mendefinisikan “ Budaya Organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal”.

Adapun indikatornya, adalah sebagai berikut :

- a. Perilaku pemimpin
- b. Mengedepankan misi perusahaan
- c. Keteladanan pemimpin
- d. Proses pembelajaran

e. Motivasi

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010): “kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur”. Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam hal untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

2.2 Hubungan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi dan Budaya Organisasi

Variabel kinerja keuangan daerah berhubungan erat dengan variabel pengelolaan keuangan, Kinerja keuangan Instansi Pemerintah dapat disebut juga sebagai hasil dari suatu sistem pengelolaan keuangan mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan kata lain, setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja keuangan dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan.

Pengukuran variabel kinerja keuangan juga memiliki kaitan erat dengan variabel akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja keuangan yang di dalam terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Pelaporan kinerja keuangan, dan mekanisme reward and punishment. “Indikator pengukuran kinerja keuangan yang baik mempunyai karakteristik relevant, *unambiguous*, *cost-effective*, dan simple, serta berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Sumarsono,2010)”.

Selain memiliki kaitan yang erat dengan variabel pengelolaan keuangan dan variabel akuntabilitas, variabel devenden kinerja keuangan juga memiliki keterkaitan dengan variabel transparansi, hal tersebut karena transparansi akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Dan untuk meningkatkan kualitas dari variabel pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi tidak luput dari peran variabel Budaya Organisasi, dimana salah satu karakteristik budaya organisasi adalah memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan aturan dan keuntungan yang ditekankan sehingga dapat meningkatkan performa yang dimiliki oleh perusahaan (Deshpande & Farley, 1999). Dengan adanya salah satu karakteristik ini, kita dapat mengetahui bahwa dengan cara bekerja dan perilaku para anggota organisasi yang baik juga akan meningkatkan kinerja keuangan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Novatiani *et al.* (2019), berjudul Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas SKPD di Kabupaten Bandung Barat serta pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan.

- b. Umar *et al.* (2018) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh, akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155 dan transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa akuntabilitas dan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh.
- c. *Penelitian Putra et al.* (2016) bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah ada pengaruh manajemen keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi kinerja pemerintah daerah dan apakah pengawasan bisa memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi kinerja pemerintah daerah . Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda untuk analisis statistik dan uji residual untuk menguji variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian, pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara transparansi memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. manajemen secara simultan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Riswanto (2016) terkait pengelolaan keuangandaerah, akuntabilitas dan transparansi bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Objek dalam penelitian adalah kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jember. Instrument dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis yang terdiri dari Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, serta Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember semakin baik.
- e. Auditya *et al.* (2013), menemukan dalam penelitiannya bahwa Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel serta transparan, maka pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal.
- f. Nasution (2018), penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- g. Ardilla (2020) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Sektor Publik Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sektor publik. *Pertama* terbukti dari agenda rutin seperti bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, sholat Jumat berjamaah, kedisiplinan, serta hubungan baik antara pimpinan dan karyawan seperti pembagian THR saat Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan untuk pengendalian intern, karyawan telah melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan tugasnya, selalu ada pencatatan setiap terjadi transaksi, absen menggunakan fingerprint, dan pengawasan rutin untuk mengontrol kinerja sektor publik tersebut; *Kedua*, akuntabilitas secara positif dan signifikan memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja sektor publik; *Ketiga*, akuntabilitas secara positif dan signifikan memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja sektor publik, dapat terlihat dari keduanya bahwa kejelasan anggaran telah terlaksanakan sesuai peraturan sehingga pelaporan keuangannya dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
- h. Rahayuni (2013), dengan judul penelitian Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi

(Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi, Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.